

**SOSIALISASI ISPO (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL)
SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAWIT BERKELANJUTAN
DI DESA BANGUN HARJA**

*Socialization of ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) as a Sustainable
Palm Oil Management Effort in Bangun Harja Village*

**Muhammad Nazarul Yanis¹⁾ Denny Triwandoyo¹⁾
Abiel Indra Pratama²⁾ Ariadi³⁾ Ari Kusumahati⁴⁾ Helny³⁾
M. Taufik Rahman³⁾ Putri Maria Ulpah³⁾ Rado³⁾**

¹⁾*Dosen Program Studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, Politeknik Seruyan*

²⁾*Mahasiswa Program Studi Teknik Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Politeknik Seruyan*

³⁾*Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, Politeknik Seruyan*

⁴⁾*Mahasiswa Program Studi Budidaya Ikan, Politeknik Seruyan*

Kelompok KKN-T Desa Bangun Harja Tahun 2023, Politeknik Seruyan

Jl. Ahmad Yani, Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir, Seruyan, Kalimantan Tengah : 74215

mnazaruly@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang berjalan saat ini telah mengalami berbagai pencapaian dan perkembangan, menemui hambatan, tantangan, serta berbagai tuntutan. Program pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dilakukan di Agrowisata Desa Bangun Harja, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Sertifikasi ISPO kepada masyarakat guna meningkatkan minat dan pemahaman dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Metode yang dipakai pada program ini adalah sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat di Desa Bangun Harja. Tahapan kegiatan pengabdian dilakukan melalui presentasi dan pembagian brosur di desa. Pelaksanaan kegiatan pendampingan juga dilakukan sebagai bentuk *monitoring*. Berdasarkan analisa dari kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bangun Harja telah memahami dan merasa berminat serta mampu untuk melakukan Sertifikasi ISPO ini secara mandiri.

Kata Kunci : ISPO, Kelapa Sawit, Desa Bangun Harja

ABSTRACT

The current implementation of the ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Certification system has experienced various achievements and developments, encountered obstacles, challenges, and various demands. The community service program is part of the Thematic Real Work activities and was conducted at Agrotourism in Bangun Harja Village, East Seruyan Hilir District, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province. This activity is to introduce ISPO Certification to the public to increase interest and understanding in optimizing sustainable palm oil management. The method used in this program is outreach and assistance to the community in Bangun Harja Village. Stages of community service activities are carried out through presentations and distribution of brochures in the village. The implementation of mentoring activities is also conducted as a form of supervision. Based on the analysis of the activities carried out, it can be concluded that the people of Bangun Harja Village understand and feel interested and can carry out ISPO certification independently.

Keywords : ISPO, Palm Oil, Bangun Harja Village

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa bangun harja merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan seruyan hilir timur. Setiap desa pada umumnya memiliki sejarah atau asal usul berdirinya desa begitu pula dengan Desa Bangun Harja. Menurut penelitian tidak ada peninggalan secara tertulis yang dijadikan bahan referensi tentang sejarah Desa Bangun Harja. Namun menurut cerita dari orang-orang tua terdahulu yang pernah tinggal di Desa Bangun Harja ini, julukan Bangun Harja itu berasal dari kondisi umum wilayah desa, bahwa pada masa itu di wilayah kampung / desa ini banyak terdapat pematang - pematang yang dijadikan menjadi lahan persawahan, selain itu wilayah desa ini banyak ditumbuhi banyak perkebunan kelapa sawit, yang sekarang telah bernama Desa Bangun Harja. Luas wilayah Desa Bangun Harja adalah sebesar 5.481,00 Ha dengan penggunaan lahan sebagian besar diperuntukkan untuk pertanian padi sawah, perkebunan, pemukiman, peternakan, perkantoran dan fasilitas-fasilitas lainnya. Penduduk Desa Bangun Harja Tahun 2023.

Perkebunan kelapa sawit telah berkembang dengan pesat sejak diusahakan secara komersil oleh perusahaan perkebunan milik negara pada tahun 1970an. Pada tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 16,8 juta ha dengan produksi minyak sawit lebih dari 30 juta ton CPO. Produksi kelapa sawit meningkat tajam sejak tahun 2000-an dimana permintaan minyak sawit dunia melonjak tajam. Harga minyak sawit yang meningkat tajam berpengaruh terhadap permintaan dan harga TBS dari semula sekitar Rp 250-500 per kg terus meningkat hingga mencapai Rp 2000-3000 per kg pada tahun 2021. Prospek perkebunan kelapa sawit yang dinilai menguntungkan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesempatan bekerja, peluang berusaha, peningkatan pendapatan pekebun dan warga di sekitarnya, pertumbuhan ekonomi pedesaan, hingga meningkatkan devisa negara.

Peningkatan harga TBS mendorong pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan produksinya baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Ekspansi kebun kelapa sawit menjadi pilihan yang paling disukai baik oleh perusahaan perkebunan maupun pekebun rakyat . Membuka kebun baru dianggap

lebih mudah dibandingkan harus meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada. Lahan-lahan mineral hampir seluruhnya sudah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit sehingga perluasan berikutnya diarahkan pada lahan gambut yang sebenarnya kurang produktif dan tidak cocok untuk tanaman kelapa sawit (Saharjo, B. H. *et al.*, 2011).

Pembukaan lahan baru yang tidak terkontrol ditambah dengan administrasi pertanahan yang kurang baik mengakibatkan tidak sedikit kawasan hutan, kawasan lindung, kawasan gambut yang digarap untuk ditanami kelapa sawit. Deforestasi yang sangat pesat menimbulkan berbagai dampak negatif yang menjadi sorotan publik internasional (Casson, A., 2000; McCarthy, J. F. *et al.*, 2009). Pembukaan lahan perkebunan dan kawasan hutan dengan cara membakar yang tidak terkendali menyebabkan berbagai masalah sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Konflik sosial tidak terhindarkan karena masalah pertanahan atau tata ruang yang tidak jelas (Colchester, M. *et al.*, 2006; Marti, S., 2008). Di bidang ekonomi, sebagian warga diuntungkan oleh adanya perkebunan kelapa sawit namun ada juga warga yang dirugikan akibat dampak eksternal kegiatan perkebunan kelapa sawit (Sayer, J. *et al.*, 2012). Kondisi lingkungan terdegradasi akibat kegiatan perluasan perkebunan yang menghilangkan habitat berbagai satwa yang dilindungi (Fairhurst, T. *et al.*, 2009).

Kehilangan keragaman hayati menjadi perhatian serius oleh berbagai lembaga internasional (Edwards, F. A. *et al.*, 2014). Pengaruh pembukaan lahan terhadap perubahan iklim juga merupakan dampak negatif yang diklaim oleh berbagai pihak (Carlson, K. M. *et al.*, 2012; Koh, L. P. *et al.*, 2008). Protes berbagai kalangan internasional terhadap dampak negatif perkebunan kelapa sawit sebagian diklaim sebagai kampanye negatif oleh beberapa pihak, namun sebagian pihak lebih menyoroti kebijakan Pemerintah Indonesia yang seharusnya memperhatikan dan memperbaiki sistem produksi minyak sawit di Indonesia.

Pengawasan terhadap kegiatan produksi perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh berbagai pihak pemangku kepentingan di rantai pasok minyak sawit sejak awal tahun 2000-an (Pro Forest, 2003; WWF-Malaysia, 2003).

Berdirinya lembaga sertifikasi khusus untuk industri minyak sawit memperlihatkan betapa seriusnya dampak negatif yang harus dihindari dari kegiatan produksi minyak sawit. Lembaga sertifikasi untuk produk-produk yang diperdagangkan secara internasional sebenarnya bukan hanya untuk produk-produk minyak sawit saja, tetapi banyak produk-produk lain yang wajib memiliki sertifikat apabila diperdagangkan di pasar internasional, seperti tanaman coklat (Nelson, V. *et al.*, 2013), kopi (Bacon, C. M. *et al.*, 2008), teh (Nelson, V. *et al.*, 2014), dan kapas (Ferrigno, S. *et al.*, 2013). Berbagai lembaga dan forum telah dibentuk untuk mengurangi dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *International Sustainable and Carbon Certificate* (ISCC), *UTZ Certified*, *Global GAP*, *Rainforest Alliance* (RA), *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO).

Usaha untuk memantau dan mengelola kegiatan rantai pasok minyak sawit secara berkelanjutan pertama kali dilakukan sejak tahun 2004 dengan didirikannya lembaga sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) oleh lembaga swasta internasional, diantaranya *Aarhus Karlshamn* (AAK), Migros, *Malaysian Palm Oil Association* (MPOA), Unilever, dan *World Wildlife Fund* (WWF) (Colchester, M. *et al.*, 2005).

Sertifikasi RSPO ditujukan untuk memastikan bahwa produk-produk minyak sawit diproduksi dengan proses dan cara-cara yang berkelanjutan (Rumondang, 2017). Sertifikasi RSPO meliputi seluruh kegiatan dalam rantai pasok minyak sawit dan produk-produk turunannya. Sertifikat RSPO menjadi syarat untuk memasarkan minyak sawit di pasar internasional, terutama di kawasan Eropa. Kondisi ini

menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia menjadi tidak nyaman karena harus tunduk pada aturan sertifikasi yang diterbitkan oleh RSPO.

Berbagai penelitian yang menganalisis dampak penerapan RSPO terhadap pendapatan sebelum dan setelah penerapan RSPO, menunjukkan hasil sebagai berikut. (Kurniawan, 2013), tidak ada perbedaan yang signifikan baik perbedaan volume penjualan ekspor CPO, biaya produksi, harga dan pendapatan sebelum dan setelah penerapan RSPO. (Febrini, 2014), RSPO tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan, sebelum dan setelah menerapkan RSPO keuntungan CPO dan PK setelah penerapan RSPO menurun dibandingkan sebelum penerapan RSPO. (Ginting, 2011), tidak ada perbedaan harga baik harga nominal maupun harga riil, volume penjualan, biaya produksi maupun pendapatan pada perkebunan sebelum dan setelah bersertifikat RSPO.

RUMUSAN MASALAH

Minyak kelapa sawit di Indonesia tengah menjadi sorotan dunia. Bukan hanya karena Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor terbesar, tetapi juga karena tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan minyak sawit yang dihasilkan melalui pengelolaan yang lestari. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menciptakan sendiri regulasi nasional pengembangan kelapa sawit dengan mengeluarkan peraturan menteri adanya penerapan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*) di Medan pada Maret 2011. Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO mulai bermunculan mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Kementerian Pertanian melakukan

pembaharuan dengan mengeluarkan peraturan tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System - ISPO*).

Kewajiban sertifikasi ISPO ternyata menjadi polemik yang secara finansial membebani para pelaku usaha kelapa sawit karena biaya sertifikasi dan kewajiban birokrasi untuk perolehan persetujuan ISPO. Salah satu pertimbangan utama bagi perusahaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikat ISPO atau tidak mengurus sertifikat ISPO adalah tingginya biaya baik untuk proses pemenuhan persyaratan maupun untuk pengurusan sertifikatnya. Biaya untuk pembuatan sertifikat yang besar tentunya mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan perkebunan dalam memproduksi kelapa sawit. Dan setelah memperoleh sertifikat ISPO, perusahaan perkebunan juga diharuskan untuk menerapkan 7 prinsip 41 kriteria dan 128 indikator sebagai persyaratan untuk penerapan ISPO. Dalam melakukan prinsip dan kriteria tersebut tentunya akan mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, baik biaya yang langsung ataupun biaya tidak langsung yang berkaitan dengan proses produksi dan penjualan.

Berdasarkan dari analisa sosial awal yang dilakukan, maka diketahui beberapa rumusan masalah yang diidentifikasi yaitu, masih banyak petani swadaya yang ada di Desa Bangun Harja belum mengetahui bagaimana dan apa saja persyaratan Sertifikasi ISPO. Selain itu para petani juga masih banyak yang belum menerapkan praktek budidaya perkebunan yang baik, dan belum menggunakan bibit yang bersertifikat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) ini berupaya memberikan edukasi kepada warga tentang persyaratan Sertifikasi ISPO agar seluruh petani kelapa sawit dapat memahami dan mulai menggunakan bibit yang bersertifikat guna mendapatkan kualitas produksi TBS yang baik.

METODE

Kegiatan KKN-T ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023 di Taman Agrowisata, Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tahapan kegiatan dimulai dengan melakukan sosialisasi dengan petani kelapa sawit yang ada di lokasi Desa Bangun Harja dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan pendampingan. Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan terdiri dari 2 tahapan utama yaitu :

1. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kelompok KKN-T Desa Bangun Harja yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Seruyan. Sosialisasi dalam bentuk presentasi dan edukasi kepada masyarakat desa yang secara umum bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit. Sosialisasi diberikan melalui presentasi yang di lakukan di Taman Agrowisata Desa Bangun Harja. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 14.00 WIB s.d. 16.30 WIB. Para petani juga diberikan brosur dan penjelasan mengenai syarat-syarat dalam pengurusan Sertifikasi ISPO dan juga proses dalam pengelolaan budidaya kelapa sawit yang baik. Hal ini sesuai dengan Rumondang (2017) yang menyatakan bahwa Sertifikasi RSPO ditujukan untuk memastikan bahwa produk-produk minyak sawit diproduksi dengan proses dan cara-cara yang berkelanjutan.



Gambar 1. Brosur Sosialisasi ISPO

2. Kegiatan Diskusi dan Pendampingan

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi akhir dan tanya-jawab. Seluruh masyarakat sangat antusias bertanya dan mengikuti jalannya proses sosialisasi yang diberikan. Masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini secara umum bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit swadaya.

Masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan ini berjumlah sekitar 30 orang dan berasal dari lingkungan Desa Bangun Harja. Pendampingan juga dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp* yang ada bersama-sama perangkat desa, untuk menjawab pertanyaan masyarakat.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Pembagian Brosur Kepada Masyarakat.

Alat dan Bahan

1. *Printer*, digunakan sebagai alat untuk mencetak brosur.
2. Pulpen dan buku, digunakan sebagai alat untuk menulis pertanyaan masyarakat.
3. *Handphone*, digunakan sebagai alat untuk melakukan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik ini melibatkan warga desa yang ada di Desa Bangun Harja hasil pembahasan ini mengacu pada kegiatan yang sudah dibuat. Sosialisasi diberikan kepada warga Desa Bangun Harja yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2023. Kegiatan dilakukan oleh kelompok KKN-T Desa Bangun Harja yang terdiri dari beberapa orang mahasiswa yakni dari Program Studi D-4

Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, Program Studi D-4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Program Studi D-3 Budidaya Ikan. Bertempat di Taman Agrowisata Desa Bangun Harja, Kec. Seruyan Hilir Timur, Kab. Seruyan. Adapun edukasi dan materi yang diberikan tentang Sertifikasi ISPO, praktek budidaya tanaman yang baik, serta manfaat dari melindungi dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan di perkebunan kelapa sawit.

Diakhir kegiatan sosialisasi, diberikan sesi diskusi dan tanya jawab kepada warga desa bangun harja mengenai materi yang telah diberikan. Warga desa terlihat sangat interaktif dan antusias bertanya.

Tabel.1 Hasil Evaluasi Kuliah Kerja Nyata

No.	Parameter	Nilai (%)	Ket.
1.	Tingkat Pemahaman Terhadap Materi	65	<i>Paham</i>
		35	<i>Belum Paham</i>
2.	Tingkat Ketertarikan Terhadap Materi	80	<i>Tertarik</i>
		20	<i>Belum Tertarik</i>
3.	Tingkat Peminatan Terhadap Bibit Bersertifikat	75	<i>Berminat</i>
		25	<i>Belum Berminat</i>

Berdasarkan hasil kuisioner dan evaluasi singkat yang dilakukan kepada warga di Desa Bangun Harja, maka dapat diketahui bahwa sekitar 65% peserta sudah paham mengenai materi dan edukasi yang diberikan, sedangkan sekitar 35% peserta masih belum paham. Dari hasil evaluasi diatas, juga dapat diketahui bahwa sekitar 75% warga yang berminat untuk bibit yang bersertifikat dan 25% yang belum berminat. Dari hasil evaluasi diatas, juga dapat diketahui bahwa 80% warga yang tertarik dengan sosialisasi yang diberikan dan 20% warga yang tidak tertarik dengan sosialisasi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok KKN-T Desa Bangun Harja, dimulai dari proses sosialisasi, edukasi dan pendampingan kepada warga Desa Bangun Harja terkait sertifikasi ISPO berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, warga Desa Bangun Harja telah memahami konsep, manfaat dan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses Sertifikasi ISPO. Warga Desa Bangun Harja juga merasa mampu untuk menerapkan praktek pertanian yang baik dan melakukan sertifikasi ISPO ini secara mandiri.



Gambar 2. Kegiatan Diskusi dan Pendampingan Kepada Masyarakat.

Masyarakat sangat tertarik dan berminat untuk mulai mengurus dan mendaftarkannya ke ISPO dilingkungan mereka masing-masing guna meningkatkan wawasan terhadap upaya konservasi lingkungan dan produksi yang berkelanjutan. Harapan dari warga Desa Bangun Harja menyatakan agar kegiatan edukasi dan sosialisasi seperti ini dapat terus dilakukan, Sehingga nantinya dapat diaplikasikan dan bermanfaat oleh seluruh warga sehingga Sertifikasi ISPO dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat petani yang ada di Desa Bangun Harja, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacon, C. M., Méndez, V. E., Gómez, M. E. F., Stuart, D., & Flores, S. R. D. (2008). *Are sustainable coffee certifications enough to secure farmers livelihoods? The millenium development goals and Nicaragua's fair trade cooperatives*. *Globalizations*, 5(2), 259-274. Retrieved from <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14747730802057688>. doi: 10.1080/14747730802057688
- Carlson, K. M., Curran, L. M., Ratnasari, D., Pittman, A. M., Soares-Filho, B. S., Asner, G. P., Rodrigues, H. O. (2012). *Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia*. In *Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia* (Vol. 109, pp.7559-7564) : National Academy of Sciences.
- Casson, A. (2000). *The hesistant boom: Indonesia's oil palm sub-sector in an era of economic crisis and political change*. Centre for International Forestry Research (CIFOR) Bogor, Indonesia.
- Colchester, M., Norman, J., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implication for Local Communities and Indigeneous People*. Forest People Program dan Sawit Watch Retrieved from: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promisedlandeng.pdf>.
- Edwards, F. A., Edwards, D. P., Larsen, T. H., Hsu, W. W., Benedick, S., Chung, A. Hamer, K. C. (2014). *Does logging and forest conversion to oil palm agriculture alter functional diversity in a biodiversity hotspot?* *Anim. Conserv.*, 17(2), 163-173. doi: 10.1111/acv.12074
- Fairhurst, T., & McLaughlin, D. (2009). *Sustainable Oil Palm Development on Degraded Land in Kalimantan*. World Wildlife Fund Washington, DC USA. Retrieved from: <http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/agriculture/WWFBinaryitem16231.pdf>. Date Accessed: 22 September 2012.
- Ferrigno, S., & Monday, P. (2013). *The economic impact of sustainability standards in the cotton sector in Africa report*. Study commissioned by GIZ (Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit), on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through its Trade Policy and Trade Promotion Fund. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/293827822_The_economic_impact_of_sustainability_standards_in_the_cotton_sector_in_Africa. Date Accessed: 18 October 2015.
- Hutabarat, S. (2017). *Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global*. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 47-64.
- Koh, L. P., & Wilcove, D. S. (2008). *Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity?* *Conservation Letters*, 1(2), 60-64. Retrieved from <Go to ISI>://000207586900002 <http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x/asset/j.1755-263X.2008.00011.x.pdf?v=1&t=hegdrkmr&s=e1a5b7650b8430f0f2ca76e113940b36064fc70> 7. doi: DOI 10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x

- Marti, S. (2008). *Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia*. Friends of the Earth, London, UK; LifeMosaic, Edinburgh, UK; and Sawit Watch, Bogor, Indonesia.
- McCarthy, J. F., & Cramb, R. A. (2009). *Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers*. *Geographical Journal*, 175, 112-123. Retrieved from <Go to ISI>://000266173700003 <http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x/asset/j.1475-4959.2009.00322.x.pdf?v=1&t=hegqaf26&s=0201ab3b6dc4bdfac59aeec03de35c4557d9c3e6>. doi: DOI 10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x
- Nelson, V., Martin, A., Stathers, T., Narayanan, L., Conroy, C., Saravanan, S., Ojeda, A. (2014). *Assessing the poverty impact of voluntary sustainability standards in global tea and cocoa supply chains: Key findings of a 4 yasear study*. Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich Retrieved from: <http://www.nri.org/images/Programmes/EquitableTrade/AssessingThePovertyImpactOfVoluntarySustainabilityStandardsInGlobalTeaAndCocoaSupplyCchains.pdf>.
- Nelson, V., Opoku, K., Martin, A., J., B., & Posthumus, H. (2013). *Assessing the poverty impact of sustainability standards: fairtrade in Ghanaian cocoa*. NRI Kent, UK.
- ProForest.(2003). *Defining Sustainability in Oil Palm Production: An Analysis of Existing Sustainable Agriculture and Oil Palm Initiatives*. Paper presented at the The Roundtable on Sustainable Oil Palm.
- Rumondang, T. (2017). *Transforming the market to make sustainable palm oil the norm*. Paper presented at the RSPO General Lecture UNRI, Pekanbaru.
- Saharjo, B. H., Wasis, B., & Mulyana, D. (2011). *Canal blocking of burnt peat swamp forest and it's future*. Paper presented at the 5th International Wildland Fire Conference, South Africa. <http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/Dossier%20Natuurbranden/Wildfire%20Conference%20Zuid-Afrika%202011/62%20Bambang%20Her%20Saharjo.pdf>
- Sayer, J., Ghazoul, J., Nelson, P., & Klintoni Boedhihartono, A. (2012). Oil palm expansion transforms tropical landscapes and livelihoods. *Global Food Security*, 1(2), 114-119. doi: 10.1016/j.gfs.2012.10.003